ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG) DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini seperti krisis ekonomi yang berulang-ulang, kesenjangan sosial, eskalasi ekonomi dan sosial dan lainnya memunculkan beberapa isu. Setidaknya ada dua isu penting yang cukup mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan yaitu isu *Corporate Governance (CG)* dan isu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dua isu ini dinilai bagian dari upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berpihak pada banyak kepentingan (*stakeholder*).

Hadir dan berkembangnya sistem ekonomi syariah mengindikasikan bahwa adanya pergeseran orientasi ekonomi mainstream yang sebelumnya menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan pemilik modal (*shareholder value*) menjadi memaksimalkan kepentingan banyak pihak (*stakeholder value*). Banyak pihak yang menyakini bahwa pengabaian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan sosial-ekonomi yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial.

Buku ini disusun dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dibidang ekonomi syariah tentang *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* secara teori dan praktik pada Lembaga Keuangan Syariah yang merujuk pada standar keuangan syariah internasional seperti standar AAOIFI dan IFSB, serta hasil riset pakar pada jurnal-jurnal internasional.

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG) DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK

Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG) DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK

Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

**ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG)
DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK**

Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG)
DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK**

Penulis:

Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

ISBN : 978-623-315-544-1

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Hasnah Aulia

Penerbit CV. Pena Persada Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

**Karya Ini Didedikasikan Untuk :
Ibuku Fatimah , Istriku Uli Fitriyani,
Dan Putriku Asmaa Aaqila Adiiba**

PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariatnya.

Buku “Islamic Corporate Governance (I-CG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) : Teori dan Praktik” ini merupakan hasil adopsi dari Tesis penulis pada program studi Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung dengan judul “Analisis Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Disiplin Pasar dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara-Negara QISMUT)”. Buku ini terdiri dari 4 Bab, yang meliputi Bab 1 tentang Pendahuluan, Bab 2 tentang Islamic Corporate Governance (I-CG), Bab 3 tentang Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR), dan Bab 4 Studi Empiris: Pengaruh I-CG dan I-CSR Terhadap Disiplin Pasar Bank Syariah Di Negara - Negara QISMUT.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan *islamic corporate governance* dan *islamic corporate social responsibility*.

Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS

KATA PENGANTAR

Bisnis dan Keuangan Syariah yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini juga ditunjukkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah yang begitu pesat. Beberapa model ekonomi dikembangkan dengan pendekatan yang Islami, salah satunya model tatakelola perusahaan (corporate governance) dan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang berdimensi nilai-nilai Islam.

Saya selaku ketua STEI Al - Ishlah Cirebon sekaligus ketua MES Cirebon mengucapkan selamat kepada penulis atas tersusun dan terbitnya buku yang berjudul "Islamic Corporate Governance (I-CG) dan Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) : Teori dan Praktik". Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang ekonomi Syariah di tanah air serta menjadi bukti konkrit implementasi dari Tridharma perguruan tinggi oleh dosen.

Dr. Ahmad Kholiq,M.A

(Ketua STEI Al-Ishlah Cirebon/Ketua MES Cirebon)

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG).....	10
A. Definisi Corporate Governance (CG).....	10
B. Model Corporate Governance Konvensional	11
C. Islamic Corporate Governance (ICG)	14
1. <i>Tawhid and Shura Based Approach</i>	15
2. <i>Stakeholders Based Approach</i>	16
D. Sharia Governance pada Bank Syariah.....	20
E. Pilar <i>Shariah Governance</i>	23
F. Implementasi Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia.....	24
G. Riset Terdahulu Tentang I-CG.....	29
BAB III ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (I-CSR)	35
A. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR).....	35
B. Teori Corporate Social Responsibility (CSR)	36
C. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).....	45
D. Islamic Corporate Social Responsibility - AAOIFI.....	50
E. Contoh Format Pelaporan ICSR pada LKS	51
F. Islamic Social Reporting (ISR).....	54
G. Penelitian CSR pada Bank Syariah.....	59
BAB IV STUDI EMPIRIS: PENGARUH ICG DAN ICSR TERHADAP DISIPLIN PASAR BANK SYARIAH DI NEGARA - NEGARA QISMUT	65
A. Profil Keuangan Syariah di Negara - Negara QISMUT.....	65
B. Qatar.....	67
C. Indonesia.....	68
D. Saudi Arabia.....	69
E. Malaysia	70
F. UEA	71
G. Turki.....	72

H. Praktik I-CG dan I-CSR Bank Syariah di Negara-negara QISMUT	73
I. Studi Empiris: Pengaruh I-CG dan ICSR Terhadap Kinerja Keuangan dan Disiplin Pasar Bank Syariah	80
1. Disiplin Pasar (Market Discipline).....	80
2. <i>Framework Disiplin Market</i>	81
J. Pengembangan Hipotesis	83
K. Pengaruh ICG dan ICSR Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	85
L. Pengaruh ICG dan ICSR terhadap Disiplin Pasar dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening.....	87
M. Pengaruh ICG dan ICSR secara Langsung Terhadap Disiplin Pasar Bank Syariah	88
N. Indikator Pengungkapan ICG dan ICSR	89
DAFTAR PUSTKA	99
PROFIL PENULIS	114

**ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG)
DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(I-CSR) : TEORI DAN PRAKTIK**

BAB I

PENDAHULUAN

Eksistensi Lembaga keuangan syariah pada dasarnya bukan pada pertimbangan profit semata, namun ia hadir didorong oleh keinginan kuat dari umat Islam akan ketersediaan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sistem keuangan yang terbebas dari praktek *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu kehadiran keuangan syariah juga respon dari krisis keuangan global yang berulang-ulang diakibatkan oleh perilaku buruk pelaku ekonomi yang mengabaikan etika, agama, dan nilai-nilai moral (Hasan Z. , 2009).

Keuangan syariah global terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. IFSB (2016) menyebutkan hingga tahun 2015 nilai keuangan syariah global mencapai USD 1.88 triliun. Tabel 1 menggambarkan kondisi keuangan Islam yang terdiri dari *banking asset*, *sukuk outstanding*, *islamic fund assets*, dan *takaful contribution* berdasarkan 5 kawasan. Secara regional, keuangan syariah masih terkonsentrasi di kawasan timur tengah yaitu kawasan teluk atau yang biasa disebut dengan istilah GCC (*Gulf Cooperation Council*)¹ dan kawasan timur tengah selain negara GCC atau yang disebut dengan istilah MENA (*Middle East and North Africa*). Kawasan lain yang cukup berkembang keuangan syariah adalah Asia yang diwakili oleh Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Banglades. Sedang sisanya tersebar di negara – negara Eropa, seperti Inggris, Turki, dan Jerman.

¹ GCC atau dalam istilah arab disebut مجلس التعاون لدول الخليج merupakan aliansi politik , ekonomi, pertahanan, dan budaya negara-negara kawasan Arab Teluk yang terdiri dari enam negara yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA. GCC didirikan di Riyadh, Saudi Arabia, pada 25 Mei 1981.

Tabel 1
Keuangan Islam Global Berdasarkan Regional
Tahun 2015 (miliar USD)

<i>Region</i>	<i>Banking Assets</i>	<i>Sukuk Outstanding</i>	<i>Islamic Funds Asset</i>	<i>Takaful Contributions</i>
Asia	209.3	174.7	23.2	5.2
GCC	598.8	103.7	31.2	10.4
MENA (exc. GCC)	607.5	9.4	0.3	7.1
Sub-Saharan Africa	24.0	0.7	1.4	0.5
Others	56.9	2.1	15.2	-
Total	1496.5	290.6	71.3	23.2

Sumber : Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016, IFSB

Dari sekian banyak segmen usaha yang menggambarkan keuangan syariah, bank syariah merupakan segmen yang paling dominan. Kurang lebih 80% keuangan syariah global didominasi oleh bank syariah yaitu sebesar USD 1.45 triliun. Aset bank syariah global menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir ini. Gambar 1. menunjukkan tren pertumbuhan aset bank syariah global sejak 2008 hingga 2015 (IFSB, 2016).

Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Aset Bank Syariah Global

Sumber : IFSB (2016)

Hadir dan berkembangnya sistem ekonomi syariah mengindikasikan bahwa adanya pergeseran orientasi ekonomi *mainstream* yang sebelumnya menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan pemilik modal (*shareholder value*) menjadi memaksimalkan kepentingan banyak pihak (*stakeholder value*). Banyak pihak yang menyakini bahwa pengabaian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan sosial-ekonomi yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial (OJK, 2015).

Permasalahan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini seperti krisis ekonomi yang berulang-ulang, kesenjangan sosial, eskalasi ekonomi dan sosial dan lainnya memunculkan beberapa isu (Hasan Z. , 2011). Setidaknya ada dua isu penting yang cukup mendapat banyak perhatian yaitu isu *Corporate Governance* (CG) dan isu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dua isu ini dinilai bagian dari upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berpihak pada banyak kepentingan (*stakeholder*) (Thomsen, 2006).

Pembahasan CG dalam konteks perbankan sudah cukup luas dan mendalam, terutama di perbankan konvensional, mulai dari model Anglo-Saxon yang lebih cenderung pada kepentingan pemegang saham (*shareholder*) dan European Model yang lebih berorientasi pada kepentingan banyak pihak (*stakeholder*). Sebaliknya masih sangat sedikit yang membahas CG dalam perspektif Islam atau *islamic corporate governance* (ICG), khususnya dalam konteks keuangan Islam, padahal keuangan syariah sudah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak tahun 1970-an. (Yunis, 2007)

ICG menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi pengembangan suatu perusahaan, terlebih lagi bagi sistem keuangan Islam seperti perbankan syariah. Tantangan penerapan ICG bagi perbankan syariah akan lebih besar dari pada perbankan konvensional. Sebab, penggunaan akad syariah memiliki karakter resiko yang berbeda-beda. Seperti penerapan akad *mudharabah* atau *musyarakah* pada deposito (Chapra M. , 2007). Oleh karena itu,

perbankan syariah harus mampu menerapkan ICG dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

Kegagalan dan kesulitan keuangan yang terjadi pada beberapa lembaga keuangan syariah di beberapa negara seperti penutupan *Ihlas Financial House* di Turki, *the Islamic Bank of South Africa*, *the Islamic Investment Companies of Egypt*, dan kesulitan keuangan pada *Dubai Islamic Bank* dan Bank Islam Malaysia Berhad disinyalir disebabkan oleh lemahnya ICG. Kebutuhan sistem tatakelola yang baik dan efisien dianggap sebagai bagian penting pada perusahaan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam tidaklah kebal dari krisis dan kegagalan governance (Hasan, 2011)

Model ICG pada keuangan syariah berbeda dengan penerapan CG pada keuangan konvensional. Sebab, keuangan syariah memiliki karakteristik yang khas dan unik dibanding model CG Anglo Saxon atau European model. Model CG dalam Islam menggabungkan unsur *Tawhid*, *shura*, aturan syariah dan tujuan perusahaan tanpa mengabaikan tujuan kesejahteraan sosial (Hasan Z. , 2009). Dalam konsep Islam, ICG jauh lebih luas pembahasannya dari konsep konvensional. Dalam konsep konvensional hanya terbatas pada hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Namun dalam konsep Islam mencakup hubungan dengan pelanggan, kompetitor, karyawan, dan komunitas muslim. Oleh karena itu, tantangan penerapan ICG pada keuangan syariah jauh lebih berat (Lewis, 2005).

Setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan kebutuhan akan ICG pada bank syariah menjadi lebih mendesak dan penting (Claessens, 2006; Darmadi, 2013). *Pertama*, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, disamping juga harus tunduk pada peraturan perbankan. Hasil penelitian Chapra & Ahmed (2002) menunjukkan bahwa deposan dan investor bank syariah sangat memperhatikan kesesuaian syariah dalam pengelolaan dana mereka oleh bank syariah, bahkan mereka akan menarik dananya jika bank syariah tidak patuh terhadap prinsip syariah. *Kedua*, bank syariah memiliki *investment account holders* (IAHs) yaitu deposan yang ikut menanggung resiko ketidakpastian bisnis

pada bank syariah karena menggunakan akad *syirkah*. Menurut Chapra & Ahmed (2002) Bank syariah harus mampu menjaga kepercayaan deposan, sebab jika bank syariah gagal melindungi kepentingan deposan, maka deposan cenderung akan melindungi hak-hak mereka dengan menarik deposito mereka di bank syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ICG yang baik akan berimplikasi pada mekanisme disiplin pasar.

Ketiga, sebagian besar bank syariah masih beroperasi di negara-negara berkembang, dimana secara kelembagaan masih cenderung lemah. Menurut Claessens (2006) di pasar negara berkembang konsentrasi kepemilikan dan kontrol masih ada pada keluarga, hukum cenderung kurang melindungi pihak minoritas seperti deposan, selain itu praktik transparansi dan pengungkapan informasi masih lemah sehingga membuat biaya monitoring dan asimetris informasi menjadi tinggi. Kurangnya disiplin pasar juga masih menjadi permasalahan negara berkembang. Dengan kondisi ini, pentingnya pelaksanaan ICG yang baik pada bank syariah.

Salah satu prinsip CG adalah transparansi yaitu keterbukaan akan informasi kepada *stakeholder*. Bagian dari transparansi tersebut adalah dengan mengungkapkan informasi CG. Informasi CG dinilai penting untuk diungkapkan oleh perusahaan sebab pengetahuan tentang CG akan berguna dalam menilai tingkat kredibilitas informasi keuangan yang disajikan, serta mengukur keakuratan prediksi keuangan dimasa yang akan datang (Bhat, Hope, & Kang, 2006). Selain itu pengungkapan CG juga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Bank syariah sebagai entitas dengan identitas berbasis agama, diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan mereka. Islam mendorong terlaksananya ICG yang baik pada perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan *stakeholder* (Hasan Z. , 2009). Konsep CG dalam Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan (Haniffa & Hudaib, 2004). Berdasarkan semangat transparansi dan akuntabilitas, bank syariah diharapkan mampu mengungkapkan fitur ICG dengan baik kepada stakeholder mereka, sehingga memungkinkan *stakeholder* untuk menilai bagaimana pengelolaan

bank serta bagaimana investasi dikelola sesuai dengan syariah dan prinsip kehati-hatian (Darmadi, 2013).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih rendahnya pengungkapan ICG pada bank syariah (rata-rata 50%). Hasil penelitian Darmadi, (2013) menunjukkan tingkat pengungkapan ICG pada 11 bank syariah di Indonesia tahun 2010 hanya 52 persen; Abdullah, Percy, & Stewart (2015) pengungkapan ICG pada 67 bank syariah di negara GCC tahun 2009 hanya 37%; Sulaiman, Majid, & Arifin (2015) pengungkapan CG pada 16 bank syariah di Malaysia tahun 2009 sebesar 51%; sedang penelitian terbaru Srairi, (2015) hanya 54% tingkat pengungkapan ICG bank syariah di GCC.

Pengungkapan ICG yang baik juga akan dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah (Safieddine, 2009). Hasil penelitian Srairi (2015) dan Ghaffar (2014) menunjukkan pengungkapan CG berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE bank syariah. Sedang Asrori (2014) menyatakan ICG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan jika diukur dengan rasio keuangan Islami.

Selain ICG, isu lainnya yang banyak mendapat perhatian yang intens baik dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah *corporate social responsibility* (CSR). Banyak studi menunjukkan bahwa jika CSR dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi perusahaan (Deegan, 2002; Hassan & Harahap, 2010). Ekonom barat mencoba untuk merancang teori, etika dan moral terkait CSR. Namun banyak dikritik karena disinyalir masalah pembenaran semata bagi perusahaan, masalah kejelasan konseptual, masalah konsistensi, dan kegagalan dalam memberikan masukan dan bimbingan bagi eksekutif bisnis (Dusuki, 2008).

Bank syariah sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat menjadikan nilai etika dan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari model bisnis mereka. Sebab, baik entitas maupun individu yang mengelolanya bertanggungjawab kepada Allah dan masyarakat (Haniffa R. , 2002). CSR merupakan bagian dari

pemenuhan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan stakeholder. Sedang salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi CSR kepada *stakeholder* adalah dengan pengungkapan pada laporan tahunan. Pengungkapan CSR berperan penting untuk menunjukkan bentuk akuntabilitas etika perusahaan dalam membantu *stakeholder* dalam pengambilan keputusan mereka (Hassan & Harahap, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih rendahnya tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah (rata-rata dibawah 50%). Maali, Casson, & Napier (2006) 13.3%, Haniffa & Hudaib (2007) 48%, Hassan & Harahap (2010) 38%, Farook, Hassan, & Lanis (2011) 16.8%, Aribi & Gao (2011) 30%, Mosaid & Boutti (2012) 25%, Kamla & Rammal (2013) 39%, Farag, Mallin, & Ow-Yong (2014) 44%, El-Halaby & Hussainey (2015) 26%. Hanya sebagian kecil penelitian yang menunjukkan hasil tingkat pengungkapan CSR bank syariah tinggi (diatas 50%) seperti Sofyani, Ulum, Syam, & Wahjuni (2012) dan Rahman & Bukair (2013) 83%.

Pengungkapan CSR juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Arshad, Othman, & Othman (2012) meneliti laporan tahunan 17 bank syariah di Malaysia dari tahun 2008 ampai 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang informasikan pada laporan tahunan secara signifikan akan berpengaruh positif terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR serta pengungkapannya dalam perspektif Islam sama pentingnya dengan strategi bisnis dalam menciptakan keunggulan kompetisi yang berkelanjutan. Selain itu perusahaan syariah perlu memperhatikan komunitas muslim dalam pengembangan produk sebagai upaya tanggungjawab sosial perusahaan secara Islami. Hasil ini senada dengan hasil penelitian Farag, et.al, (2014) dan Platonova, et.al, (2016) yang menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh positif pada kinerja keuangan bank syariah di beberapa negara.

CSR pada bank syariah juga mendapat respon dari *stakeholder* sebagai bagian dari mekanisme disiplin pasar. Hasil

penelitian Dusuki & Dar (2007) menunjukkan bahwa nasabah dan deposan bereaksi terhadap CSR pada bank syariah. Sebagian besar nasabah (51%) dan deposan (53%) setuju dengan pelaksanaan CSR pada bank syariah, bahkan mereka akan menghukum bank syariah jika tidak menjalankan CSR dengan menarik dana mereka dan beralih ke bank syariah lain yang lebih bertanggungjawab terhadap sosial. Hasil menunjukkan bahwa CSR menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi reputasi bank syariah di mata deposan. Dengan kata lain pelaksanaan dan pengungkapan CSR akan meningkatkan reputasi bank syariah (Arshad, Othman, & Othman, 2012).

Ketika investor memiliki akses informasi dan mengetahui kondisi perusahaan, investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut daripada perusahaan lain yang tidak memberikan akses informasi. Selain itu, transparansi sangat diperlukan dalam dunia perbankan, mengingat pihak (nasabah) penyimpan dan investor berkepentingan terhadap keamanan dan pengelolaan dananya. Mekanisme pengawasan oleh para pelaku pasar terhadap risiko dan kinerja bank inilah yang disebut dengan disiplin pasar (Hasan, 2013). Salah satu alat yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan, termasuk informasi CG dan CSR adalah laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan dinilai cukup efektif untuk menyampaikan pesan tertentu kepada *stakeholder*, termasuk pada lembaga keuangan syariah (Haniffa & Hudaib, 2004).

Pengungkapan (*disclosure*) informasi yang diperlukan oleh *stakeholder* perusahaan merupakan bentuk transparansi dalam peningkatan disiplin pasar (*market disiplin*). Disiplin pasar dalam sektor perbankan dapat dimaknai sebagai situasi dimana *privat sector agent* menghadapi biaya sebagai akibat bank melakukan tindakan yang berisiko, dan mengambil tindakan pada basis biaya. Salah satu prasyarat disiplin pasar yang efektif adalah transparansi informasi bank kepada deposan. Dimana dari informasi tersebut, deposan bertindak terhadap dana mereka. Studi empiris menunjukkan kehadiran disiplin pasar, dimana

deposan yang dananya tidak dijamin akan merespon dengan menarik deposito mereka (mekanisme kuantitas) atau menuntut pengembalian yang tinggi (mekanisme harga) (Alaeddin, Abojeib, & Shah, 2015).

Transparansi dan disiplin pasar pada bank syariah menjadi penting sebagai aplikasi sistem bagi hasil, dimana deposan bank Islam akan menghadapi risiko yang lebih tinggi daripada nasabah bank konvensional yang menerima hasil yang pasti (Hasan, 2013). Dengan akad bagi hasil, hasilnya dihadapkan pada ketidakpastian, sehingga risikonya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang hasilnya pasti karena menggunakan sistem bunga. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian empiris persepsional oleh Ariffin, Archer, & Abdel Karim (2007), yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko dan transparansi pada bank syariah lebih ditekankan daripada bank konvensional terkait dengan sistem bagi hasil.

Namun di lain sisi, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa bank syariah masih kurang melakukan transparansi dan pengungkapan risikonya kepada publik, atau dengan kata lain transparansi yang dilakukan belum optimal. Hasi penelitian ini memperlihatkan pentingnya peningkatan transparansi dan disiplin pasar pada bank syariah. Lebih khusus, IFSB (2015) menyatakan bahwa pengungkapan oleh bank syariah baik informasi keuangan maupun non-keuangan kepada deposan dapat meningkatkan transparansi dan disiplin pasar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin pasar adalah kinerja keuangan. Penelitian Riandika & Taswan (2015) menunjukkan bahwa ROA dan CAR berpengaruh positif terhadap disiplin pasar yang diprosikan dengan pertumbuhan deposito bank di Indonesia. Alaeddin, et.al (2015) meneliti disiplin pasar pada 44 bank syariah di beberapa negara menunjukkan kualitas aset dan risiko likuiditas berpengaruh terhadap disiplin pasar bank syariah di Malaysia yang diprosikan dengan pertumbuhan pemilik rekening investasi (*investment account holders*).

BAB II

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (I-CG)

A. Definisi Corporate Governance (CG)

Konsep CG dalam konteks sektor keuangan memiliki karakteristik dan fitur tersendiri yang berbeda dari sektor lainnya. GCG pada sektor keuangan memerlukan perhatian dan perlakuan yang lebih luas karena melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Secara umum OECD (2004:11) memberikan definisi *corporate governance* dengan “*a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders*”. Definisi ini memberikan gambaran umum bahwa *corporate governance* merupakan hubungan antara para pihak dalam sebuah perusahaan yaitu manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

BCBS (2006:4), dalam ‘*Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations*’ memberikan penjelasan *corporate governance* pada perbankan dengan:

“the manner in which the business and affairs of individual institutions are governed by their BOD and senior management affecting how a bank sets its corporate objective, daily business, interest of the stakeholder, to align corporate activities operate in a safe and sound manner and to comply with laws and regulations, and to protect the interest of depositors”.

Definisi ini menjelaskan lebih spesifik tentang *corporate governance* pada perbankan. BCBS memberikan penjelasan bahwa ‘*stakeholders*’ pada bank adalah pengawas, pemerintah, deposan, nasabah, pelanggan, dan karyawan.

Sedang *corporate governance* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syariah oleh IFSB 03 dalam *Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic*

Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds) didefinisikan sebagai :

a set of organizational arrangements whereby the actions of the management of IIFS are aligned, as far as possible, with the interests of its stakeholders; (ii) provision of proper incentives for the organs of governance such as the Board of Directors, SSB and management to pursue objectives that are in the interests of the stakeholders and facilitate effective monitoring, thereby encouraging IIFS to use resources more efficiently; and (iii) compliance with Islamic Shari`ah rules and principles.

Corporate governance pada LKS adalah seperangkat pengaturan organisasi di mana tindakan manajemen LKS selaras, sejauh mungkin, (i) dengan kepentingan para pemangku kepentingannya; (ii) pemberian insentif yang tepat bagi organ tata kelola seperti Direksi, DPS dan manajemen untuk mengejar tujuan yang menjadi kepentingan para pemangku kepentingan dan memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong LKS untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien; dan (iii) kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah Islam (IFSB, 2006).

B. Model Corporate Governance Konvensional

Berbagai model *corporate governance* dituangkan oleh beberapa pakar untuk mencari yang paling relevan untuk diterapkan. Gagasan *corporate governance* bermunculan seiring terjadi berbagai skandal keuangan, seperti skandal Enron di Amerika Serikat yang oleh sejumlah kalangan disinyalir diakibatkan oleh lemahnya GCG. Becht dan Barca (2001) dan Lewis (2005) dalam (Hasan Z. , 2009) melakukan penelitian terhadap beberapa model *corporate governance* pada beberapa perusahaan. Secara umum ada dua model *corporate governance* yang paling dominan yaitu *Anglo-Saxon Models* dan *European Models*.

1. Anglo-Saxon Model

Model *corporate governance* Anglo-Saxon atau yang kadang disebut dengan *market-based system* atau *shareholder-value system* atau *principle-agent model* merupakan teori yang